

Dinamika Negoisasi GAM dan RI di Helsinki

Catatan atas Tahap Penjajakan (Trust Building) Hingga Pencapaian Kesepakatan Damai (MoU)

Risky Novialdi M.IR

Peneliti muda The New Indonesia Foundation dan alumnus Pasca Sarjana Hubungan Internasional UMY Yogyakarta

Abstract: *The articles disclosed on the peace agreement between GAM and the RI is not an easy journey, but it requires the preparation of good strategies and iknikad so as to create an effective negotiation forum. In the negotiation phase requires maturity and experience starting from the exploratory stage, the selection of mediators, until the commitment after the deal. This is what both GAM and RI have achieved in reaching a peace agreement. Aceh's dark sheet has been closed, now the new sheet has been opened since 2005 ago. Now is the time for Aceh to lead and manage its own territory with "foward looking" previously proposed by the RI in negotiations. This peace agreement should be put to good use, especially for the benefit of the people of Aceh, not only for ex GAM.*

Kata Kunci: Aceh; GAM; Indonesia; konflik

Pendahuluan

Perang saudara antara Aceh dengan Republik Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Banyak hal yang melatar belakangi munculnya perperangan ini, namun salah satu alasan yang paling menonjol adalah identitas ke-Aceh-an yang dinilai berlawanan dengan identitas Indonesia. Identitas Aceh sendiri pada awalnya dibangun dan dipengaruhi oleh identitas politik malaya, yang merupakan antisipasi masuknya imperialisme melalui selat malaka. Dalam perkembangannya identitas ke-Aceh-an yang ditunjukkan dengan berlakunya syari'at Islam seperti sekarang, pada dasarnya merupakan suatu hukum yang pernah berlaku di masa kesultanan. Karena komitmen terhadap Islam dan sultan ini, maka identitas keagamaan menjadi salah satu ciri dari identitas ke-Aceh-an.

Identitas ini yang kemudian menjadi konflik dengan indonesia dari segi historis, adat istiadat, bahasa, dan masalah teritori, karena Indonesia di- anggap telah mengalami krisis identitas bahkan sampai dengan sekarang. Orientasi ke-Aceh-an inilah yang kemudian turut melahirkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dimotori oleh Hasan tiro.³ Nama GAM dalam bahasa inggris disebut Aceh Sumatra National Liberation Front atau disingkat ASNLF yang sebelumnya adalah National Liberation Front of Aceh Sumatra (NLFAS). Kata GAM hanya dipakai untuk komunikasi di tingkat nasional saja, namun ketika berkomunikasi dengan pihak internasional, maka kata yang digunakan adalah ASNLF.

Perjuangan GAM terbagi dalam dua fase yang pertama fase konsolidasi kelompok yaitu terjadi pada tahun 1976-1980. Yang kedua adalah fase perang senjata yaitu tahun 1980-2007. Pada fase awal gerakan ini dilakukan oleh Hasan Tiro dengan berkomunikasi dengan tokoh-tokoh DI/TII di masa Daud Beureueh, beliau juga terlibat dalam komunikasi di tingkat internasional ketika ia menjadi mahasiswa Fakultas Hukum di universitas kolombia dan sebagai staf perwakilan Indonesia di New York. Pada September 1954 nama Hasan Tiro dikenal indonesia dan dunia internasional ketika beliau muncul sebagai "Duta besar Republik Islam Indonesia di Amerika dan di perserikatan bangsa-bangsa (PBB).⁴ Alat

komunikasi yang waktu itu digunakan adalah surat dan juga dengan hadir di forum-forum internasional dan menyampaikan aspirasinya.

Fase selanjutnya adalah ketika sudah terjadi berperangan dengan senjata. Pada fase ini mereka berkomunikasi dengan berbagai cara untuk menunjukkan eksistensinya, hingga sampai ke tahap negosiasi yang sebelumnya sangat mereka hindari, karena dalam benak mereka merdeka adalah harga mati. Dalam bahasan ini penulis akan coba paparkan tentang proses yang terjadi ketika GAM dan RI mencapai kesepakatan untuk melakukan negosiasi, mulai dari pra negosiasi, hingga pasca negosiasi. Selain itu penulis juga akan coba menjelaskan tentang apa yang membuat pihak GAM akhirnya bersedia melakukan negosiasi? Dan apa saja teknik negosiasi yang masing-masing pihak praktekkan?

Kekecewaan GAM

Negosiasi menjadi suatu hal yang sangat berat diterima oleh pihak GAM yang sebelumnya sangat menginginkan kemerdekaan (terlepas dari Republik Indonesia), walaupun harus terjadi negosiasi, itu pun dengan hasil akhir pisah dari Indonesia bukan dengan keputusan damai dan kembali tergabung dalam Indonesia. Hal ini GAM lakukan bukan tanpa alasan, namun ada beberapa hal yang membuat GAM memutuskan seperti demikian. Di antaranya adalah karena kekecewaan yang dialami oleh orang-orang Aceh sejak beberapa waktu silam, kekecewaan tersebut adalah:

- a. Ketika bung Karno datang ke Aceh pertama kali dan mengadakan pertemuan dengan Tengku Daud Beureueh untuk mengumpulkan dana yang akan digunakan untuk membeli pesawat terbang Seulawah RI-001 dan Dakota RI-002, Aceh begitu bangga dengan pernyataan Bung karno bahwa Aceh adalah “daerah modal,” Aceh adalah daerah payung. Kemudian Bung Karno datang kedua kalinya dan meminta rakyat Aceh berjuang melawan Belanda. Persetujuan dilakukan dengan syarat agar setelah perjuangan kemerdekaan selesai, Aceh dibolehkan menjalankan Syariat Islam. Ketika Jaminan tertulis diminta, Bung Karno sangat terharu dan meneteskan air mata, akhirnya Tengku Daud Beureueh pun bersedia untuk menerima dengan perjanjian lisan saja. Namun setelah Indonesia merdeka, janji tersebut tidak ditepati oleh Bung Karno. Bahkan otonomi daerah dihapuskan, dan Daud Beureueh pun dicurigai.
- b. Kecewa karena dicabutnya keistimewaan Aceh yang berdasarkan pada UU No. 18/1965 tentang pemerintahan daerah di mana Aceh memperoleh keistimewaan di bidang agama, adat istiadat dan pendidikan. Akan tetapi setelah berlaku UU No. 5/1974, keistimewaan Aceh tersebut dihapus.
- c. Pada masa orde baru, eksplorasi Sumber kekayaan alam Aceh justru berbanding terbalik dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, bahkan Hasan Tiro menganggap semua ini sebagai kolonialisasi Jawa.
- d. Masa-masa Megawati Soekarno Putri sempat dicoba dengan jalan damai dengan meneruskan rangkaian perundingan yang dirintis oleh presiden sebelumnya, Abdurrahman Wahid dalam program Cessation of Hostilities Agreement (CoHA), yang dirancang sebagai jalan untuk mengakhiri perang, dan mengembalikan Aceh ke dalam Republik Indonesia, namun praktek ini gagal bahkan Megawati melakukan kesalahan dengan megantikan kegagalan CoHA ini dengan menerapkan Darurat Militer sejak 19 Mei 2003, yang akhirnya bukan menyelesaikan konflik bahkan membuat penyelesaian konflik GAM-RI semakin sulit.

Kekecewaan tersebut yang membuat pihak GAM masih enggan melakukan negosiasi dengan pihak Indonesia. apalagi pada masa orde baru cara-cara kekerasan lebih dominan

dilakukan daripada cara non kekerasan, semua kejadian ini membuat pihak GAM masih tidak percaya dengan iktikad baik yang ada pada pihak RI untuk melakukan negosiasi.

Membangun Kembali Kepercayaan GAM (Trust Building)

Setelah mengalami berbagai macam kegagalan untuk melakukan negosiasi dengan Aceh, pemerintah RI akhirnya melakukan sebuah terobosan baru dengan menghadirkan Second Track Diplomacy (Diplomasi di balik layar) atas inisiatif Jusuf Kalla yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan rakyat (menko Kesra). Jusuf Kalla menugaskan orang kepercayaannya yang bernama Farid Husein untuk mencari alternatif bagi penyelesaian konflik Aceh secara bermartabat dan berkeadilan.

Second Track Diplomacy dilakukan agar dapat masuk ke pusat pimpinan GAM dalam rangka melakukan komunikasi politik di satu sisi dan membangun kepercayaan pada sisi yang lain (Trust Building). Dalam upaya ini akhirnya Farid Husein pun menemukan beberapa aktor GAM yang menjadi “dalang” dalam menggerakkan seluruh personil GAM di Aceh, dari sini Farid menemukan “titik terang” terkait pihak mana saja yang harus dia dekati jika ingin menyelesaikan konflik secara bermartabat dan berkeadilan. Menurut Farid aktor yang menggerakkan GAM ada lima kategori, yaitu:

- Kelompok think thank (Intelektual GAM, mulai dari Jakarta, Aceh, hingga Australia).
- Civil Society yang berada di Aceh
- Tentara Neugara Aceh, Khususnya panglima-panglima GAM
- Perwakilan GAM di Denmark, Belanda, Singapura dan Malaysia
- Pemerintahan GAM yang bermarkas di Swedia⁷

Jika ingin menyelesaikan konflik Aceh secara bermartabat dan berkeadilan, maka harus sukses membangun Trust Building di setiap lini dengan pihak- pihak seperti yang disebutkan di atas. Pendekatan personal yang dilakukan oleh Farid Husein, membuatnya dapat berkomunikasi dengan petinggi GAM dan mengetahui tuntutan-tuntutan serta harapan yang diinginkan oleh pihak GAM. Selama kurang lebih setahun membangun kepercayaan dengan pihak ini, akhirnya Farid dapat masuk dan diterima oleh pimpinan GAM di Swedia. Modal inilah yang dimiliki oleh juru runding penyelesaian konflik terbaik Indonesia tersebut, sehingga mempermudah jalan GAM dan RI menuju jalur negosiasi di Helsinki.

Mediasi Konflik Aceh

Setelah beberapa proses lobi yang dilakukan oleh Farid Husein, akhirnya Aceh bersedia melakukan perundingan, namun dengan beberapa syarat, yaitu pertama harus melepaskan tahanan perunding GAM yang terdahulu, yaitu ketika perundingan di Tokyo. Kedua perundingan harus ada pihak mediator netral, dan Ketiga, penarikan mundur tentara secara tegas. Bahkan dari pihak Indonesia, agar GAM bersedia melakukan perundingan, disamping Indonesia bersikap Yielding dari semua tuntutan GAM, Indonesia juga menawarkan Aceh sebagai daerah otonomi khusus jika Aceh bersedia melakukan perundingan.

Setelah semua ini disetujui, selanjutnya adalah penentuan pihak mediator. Pihak RI menganjurkan Crisis Manajemen Initiative (CMI)⁸ sebagai mediator, karena di CMI ada Martti Ahtisaari yang merupakan Ketua Dewan Direktur yang juga merupakan mantan Presiden Finlandia. Dengan posisi dan pengalamannya ini, yang membuat Indonesia yakin Martti mampu menjadi negosiator yang baik, dan bisa merangkul kedua pihak yang berkonflik sehingga tercipta Track One atau Official Diplomacy yang nantinya akan sangat berguna bagi kesuksesan negosiasi.

Penawaran Martti sebagai Mediator tidak semerta-merta diterima oleh pihak GAM, GAM malah menawarkan Henry Dunant Center (HDC) sebagai mediator. Namun karena kesuksesan melobi dari pihak Indonesia dan Martti sendiri yang bertemu dengan tokoh-tokoh GAM, akhirnya GAM pun setuju Martti Ahtisaari dengan CMI-nya menjadi mediator penyelesaian konflik GAM-RI.

Ada juga faktor alam yang mendukung percepatan negosiasi ini dilakukan, yaitu gempa dan tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004. Setelah peristiwa ini, pihak asing dengan mudah masuk ke Aceh (teritorial wilayah Indonesia) dengan alasan kemanusiaan. Pihak asing ini meminta jaminan agar bantuan dapat disalurkan dengan lancar, apabila masih terjadi kontak senjata antara GAM dan TNI maka akan mengganggu pemberian bantuan terhadap korban tsunami. Dengan alasan ini juru runding GAM akhirnya menyatakan bahwa demi kepentingan rakyat Aceh, mereka bersedia berunding. Namun faktor alam ini hanyalah pendukung dan percepat negosiasi, karena jalan untuk menuju perundingan di Helsinki sudah dirintis sejak 200 oleh Farid Husein atas inisiatif Jusuf Kalla.

Negosiasi GAM dan RI

Perundingan antara Aceh dan GAM akhirnya berlangsung pada 27 Januari 2005, di kompleks Koningstedt Manor, Vantaa, Helsinki. Pihak CMI yang berperan sebagai mediator membuat aturan main dalam negosiasi tersebut, yaitu perundingan ini tidak mengikat kedua belah pihak hingga pada akhirnya kedua belah pihak menyepakati sejumlah agenda yang ditentukan bersama (draft yang berbentuk MOU), dengan strategi CMI ini, maka kedua belah pihak dapat membicarakan isu-isu krusial dan dapat pula dengan cara informal. Juru runding dari pihak RI disupervisi oleh Widodo, AS selaku menko Polhukam, dan diketuai oleh Hamid Awaluddin selaku Menteri Hukum dan HAM, dan anggotanya yang lain yaitu Sofyan Jalil, Farid Husein, Usman Basja dan Gusti Wesaka Puak. Sedangkan pihak GAM diwakili oleh Malik Mahmud, Zaini Abdullah, Bakhtiar Abdullah, Muhammad Nur Dzuli, dan Nurdin Abdurrahman.

Dalam perundingan pertama GAM masih kukuh untuk merdeka, sedangkan tawaran dari pihak RI adalah otonomi khusus sebagai jalan terbaik. Akhirnya terjadi perundingan dead lock kurang lebih selama tiga jam, GAM masih melakukan strategi Contending dengan tuntutan Aceh merdeka dan internasionalisasi permasalahan Aceh. Namun setelah CMI melakukan lobi terhadap pihak GAM akhirnya GAM sepakat menurunkan tuntutan menjadi Self-Government.

Perundingan putaran kedua dilakukan pada 21-2 Februari, di tempat yang sama. Pada pertemuan kedua ini, pihak RI memulai tuntutan dengan menolak “advisor” delegasi GAM, yang dibawa oleh pihak GAM, “Advisor” yang dimaksud adalah Damien kingsbury dan Vacy Vlazna, yang merupakan warga negara asing yang juga bukan dari pihak mediator. Pihak Indonesia menentang kehadiran kedua orang ini, karena pihak RI menganggap kehadiran mereka akan menginternasionalisasikan masalah Aceh, sedangkan menurut pihak RI, masalah Aceh adalah perkara domestik, sehingga kehadiran pihak asing ini tidak diperlukan. Pada putaran kedua ini juga pihak RI masih apda tuntutan yang pertama yaitu penyelesaian konflik Aceh dalam kerangka otonomi khusus dan penyelesaian konflik secara permanen bukan Cuma gencatan senjata.

Dari pihak GAM masih menuntut hal serupa dengan putaran pertama, menurut pihak GAM otonomi khusus tidak akan menyelesaikan permasalahan di Aceh, karena hal ini sudah pernah dilakukan sebelumnya dan gagal. Pada hari pertama ini, karena tidak ada titik temu

antara RI dan GAM, pihak RI sudah memutuskan untuk berhenti bernegosiasi dan membeli tiket untuk pulang ke Jakarta, hingga akhirnya ditahan oleh Martti dengan menyatakan, ada prinsip yang harus dianut oleh kedua belah pihak tidak boleh menarik diri begitu saja dalam perundingan, kecuali atas seizin CMI, bila salah satu pihak menarik diri dari perundingan, maka CMI akan mengumumkan kepada dunia internasional bahwa pihak yang menarik diri telah menggagalkan perundingan. Setelah lobi yang dilakukan oleh Martti terhadap pihak GAM agar GAM menurunkan tuntutan menjadi self government dan mengancam apabila GAM tidak menurunkan tuntutannya, maka Uni Eropa tidak akan membantu dan melindungi pihak GAM lagi, hal ini dapat dilakukan Martti dengan posisinya juga hubungannya dengan Uni Eropa.

Akhirnya pihak GAM setuju untuk mengganti tuntutan menjadi Self Government. Ini merupakan ide kreatif politik karena kedua belah pihak sudah terbentur dengan tembok perbedaan. Pihak RI masih sangat kukuh dengan pemberlakuan otonomi khusus untuk penyelesaian konflik di Aceh sedangkan pihak GAM kata otonomi khusus ini sudah dianggap kotor, sehingga mengusulkan ide Self Government sebagai solusi permasalahan konflik Aceh dan konflik perpolitikannya.

Self government sebenarnya konsep yang sudah dirancang oleh Nurdin Abdurrahman dan Damien Kingsbury sebagai Best Alternative to negotiated Agreement (BATNA), yang diusulkan apabila perundingan sudah tidak mencapai kesepakatan. Konsep Self Government yang diusulkan oleh pihak GAM ini mirip dengan konsep federasi, karena Aceh memiliki sejumlah kekhususan yang sangat luas, sementara dalam konsep otonomi khusus yang ditawarkan oleh pihak RI masih mempunyai keterbatasan-keterbatasan. Pada pertemuan kedua ini juga dibahas tentang rehabilitasi Aceh pasca tsunami dan tentang amnesti, pengelolaan keamanan, monitoring dan implementasinya, serta jadwal perundingan selanjutnya. Perundingan tahap kedua ini lebih membuahkan hasil daripada perundingan pertama yang masih sangat kaku.

Perundingan selanjutnya (putaran ketiga) dilaksanakan pada 12-16 April 2005 ditempat yang sama. Pada perundingan ini mempunyai kemajuan yang signifikan, karena pada perundingan ini kedua belah pihak telah membahas dan menyepakati beberapa hal penting, yaitu:

1. Kedua belah pihak memandang bahwa penyelesaian secara permanen dan komprehensif konflik Aceh.
2. Menegosiasikan definisi kerangka dari struktur administratif Aceh.
3. Mendefinisikan secara rinci mengenai amnesti.
4. Eksplorasi atas partisipasi lokal dalam pemilu.
5. Transparansi dalam hal pendapatan dan alokasi dana antara pusat dan pemerintah Aceh.
6. Kedua belah pihak membuka peluang bagi regional organisasi untuk memonitor komitmen yang akan disepakati oleh kedua belah pihak.
7. Kedua belah pihak tidak melakukan pergerakan pasukan selama proses perundingan berlangsung. 9

Perundingan putaran keempat dan kelima merupakan titik penentu perundingan ini, apakah akan sukses atau tidak. Perundingan keempat dilaksanakan pada 26-31 Mei 2005, sejumlah desain yang diusulkan oleh pihak GAM (yang dibantu oleh konseptor sekaligus penasihat GAM, Damien Kingsbury), sebagiannya sudah disetujui oleh pihak perunding RI, khususnya mengenai partai politik lokal dalam kerangka self government wilayah Aceh, provinsi, pemilu lokal, dan masalah amnesti. Pada perundingan keempat ini pula kedua belah pihak menyetujui adanya dokumentasi dan formulasi tertulis capaian yang telah

disepakati kedua belah pihak, inilah yang nantinya menjadi awal penulisan draft MOU, yang akan disusun oleh CMI.

Perundingan terakhir (kelima) yang paling alot dan teracam gagal (deadloc) karena kedua belah pihak masih belum sampai pada keata sepakat pada permasalahan di Aceh akan diberi wewenang untuk adanya partai lokal. Pihak GAM masih sangat kukuh dengan alasan partai lokal adalah jalan satu- satunya agar perpolitikan Aceh bisa berubah dan eks Gam nantinya bisa ikut berpartisipasi politik dengan bebas, jadi self government dan partai lokal adalah “harga mati” dari pihak GAM. Dari pihak RI, tuntutan tersebut ditolak karena hal ini tidak dapat diputuskan langsung, selain itu tuntutan ini bertentangan dengan UU No. 12/2003 tentang partai politik dan dalam UU tersebut tidak ada penjelasan tentang partai lokal. Apabila tuntutan GAM dipenuhi, maka Indonesia harus merubah UU nasional terkait partai politik.

Pertimbangan tentang partai lokal dan pemerintahan sendiri menjadi pertimbangan yang sangat berat bagi pihak RI. Akhirnya pihak delegasi RI melakukan komunikasi langsung dengan presiden RI dan wakil presiden yang waktu itu dijabat oleh SBY dan JK. SBY sempat menawarkan agar eks GAM mencalonkan diri sebagai kepala daerah melalui partai yang sudah ada dan berbasis di Aceh, naun tawaran tersebut juga ditolak oleh pihak GAM yang masih menuntut adanya partai lokal dan pemerintahan sendiri. Tentang partai lokal ini akhirnya mencapai kesepakatan dengan keputusan diambil oleh pejabat RI terutama wakil oresident Jusuf Kalla, Jusuf Kalla akhirnya setuju dengan tuntutan ini, namun harus mencari kata-kata yang tepat untuk butiran perjanjian tertulis agar tidak heboh di parlemen.

Begitu pula dengan konsep self government, ini berkaitan tentang pembagian sumber-sumber ekonomi yang menguntungkan masyarakat Aceh; secara politik ditentukan oleh pemerintah Aceh karena itu pemerintah pusat harus mengonsultasikan kebijakan yang berkaitan tentang dengan persetujuan internasional, kebijakan administratif, hutang luar negeri, penetapan bunga bank dan masalah pengangkatan jaksa dan Kapolda.

Pada perundingan terakhir ini pula disepakati tentang adanya Aceh Monitoring Mission (AMM), yang terdiri dari Uni Eropa dan ASEAN sebagai pengawas perdamaian dan keamanan Aceh. Untuk ASEAN terutama akan diwakili oleh lima negara yaitu, Singapura, Thailand, Brunai Darussalam, Filipina dan Malaysia. Dengan berakhirnya perundingan ini maka juga disepakati dan ditandatangani draft MOU Helsinki yang telah disusun oleh CMI, dengan demikian terlahirlah konsensus normatif antara GAM dan RI, untuk mengakhiri perang yang sudah berlangsung selama lebih dari 30 tahun dan ACEH dan GAM resmi berdamai.

Kesimpulan

Kesepakatan damai yang terjadi antara GAM dan RI bukanlah suatu perjalanan mudah, namun membutuhkan penusunan strategi dan iknikad yang baik sehingga dapat mewujudkan forum negosiasi yang efektif. Dalam tahap negosiasi pun dibutuhkan kematangan dan pengalaman mulai dari tahap penjajakan, pemilihan mediator, hingga komitmen setelah terjadi kesepakatan. Hal inilah yang diwujudkan dengan baik oleh kedua belah pihak GAM dan RI dalam mencapai kesepakatan damai.

Meskipun sempat terjadi dua kali Deadlock, namun pihak ketiga (mediator) dengan pengalamannya dapat mencairkan suasana dan menarik kedua belah pihak untuk kembali berunding. Dari segi tehnik negosiasi, kita dapat melihat dinamika pemilihan strategi kedua belah pihak dalam memperjuangkan tuntutan dan juga saat menurunkan tuntutan. Yang cukup menarik adalah dari pihak GAM yang sebenarnya kurang berpengalaman, namun mereka

mempunyai konseptor dan “penasehat”, Demain Kingsbury, yang cukup handal dalam menyusun strategi untuk GAM ketika bernegosiasi, sehingga pihak GAM dapat memainkan dengan baik dalam perundingan.

Tidak berhenti di situ, juga patut diapresiasi delegasi dari pihak RI, terkait komitmen mereka sehingga kesepakatan damai dapat terwujud. Profesionalitas mereka sebagai wakil negara juga sangat baik, terlihat bagaimana ketika mereka selalu berkomunikasi terlebih dahulu dengan presiden dan wakil presiden sebelum sebuah keputusan penting diambil, dengan demikian mereka juga dapat menjaga kestabilan politik di dalam negeri. Sebenarnya Indonesia mempunyai peluang untuk menghancurkan Aceh (GAM) sehancur-hancurnya, terutama setelah terjadi gempa dan tsunami serta kekuatan GAM lemah pada saat itu. Kesediaan RI untuk mengalah dalam negosiasi, dan setuju dengan tuntutan GAM merupakan sebuah keputusan yang bijak, di mana sebenarnya GAM waktu itu sedang dalam posisi powerless diplomacy¹⁰(karena kondisi di daerah porak poranda setelah tsunami, ditambah para petinggi GAM yang ahli negosiasi serta paham lapangan sudah dalam tahanan).

Lembaran kelam Aceh sudah ditutup, kini lembaran baru sudah dibuka sejak 2005 silam. Kini saatnya Aceh memimpin dan mengatur sendiri wilayahnya dengan “forward looking” yang sebelumnya diusulkan oleh pihak RI dalam negosiasi. Kesepakatan damai ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, terutama untuk kepentingan rakyat Aceh, tidak hanya untuk eks GAM. Dalam salah satu syair Aceh yang juga dilantunkan oleh personil GAM disebutkan “yang kamoe lakee damee peutimang, bungkoh lam reugam bek salah buka” artinya: (yang kami minta, jagalah perdamaian, bungkus dalam genggam jangan salah buka). Wallahu’alam. (*)

Bibliografi

Hasan Tiro, *Demokrasi Untuk Indonesia* (Jakarta: Teplak Press, 1999).

Moch. Nurhasim, *Konflik dan integrasi politik “Gerakan Aceh Merdeka”: Kajian tentang Konsensus Normatif antara RI-GAM dalam Perundingan Helsinki*. (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

Otto Syamsuddin Ishak, *Dari Maaf ke Panik Aceh “Sebuah Sketsa Sosiologi- politik”* 1, (Jakarta, LSPP, 2000)

Otto Syamsuddin Ishak, *Dari Maaf ke Panik Aceh: Sebuah Sketsa Sosiologi- politik* (Jakarta: LSPP, 2008), cet.3.

Sidiq Ahmadi Surwandono, *Resolusi Konflik di Dunia Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)

Taufik Abdullah, “Sistem Budaya Aceh,” dalam Mochtar Buchori, *Pandangan Budaya Daerah dan Pembinaan masyarakat pancasila; Laporan dari Empat Daerah*, (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 1985)

Tim Lembaga Informasi Nasional, *Dinamika Konflik Dalam Transisi Demokrasi, Informasi Potensi Konflik dan Potensi Integrasasi Bangsa (Nation and Character Building)* (Jakarta: Lembaga Informasi Nasional Republik Indonesia, 2004).